

KEBIJAKAN KEAMANAN AUSTRALIA TERHADAP ANCAMAN TIONGKOK DI PASIFIK SELATAN TAHUN 2017-2022

Oleh : Benedetta Claryssa

Pembimbing: Faisyal Rani, S.IP., MA

email: benedettaclaryssa@gmail.com

Jurusan Hubungan Internasional`

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research analyses Australia's security response to Chinese security threats in the South Pacific. China's presence in the South Pacific with economic assistance, military assistance, and security cooperation have raised concerns for Australia. This concern has made Australia, a regional power in the South Pacific, view China as a threat. Australia's concern is evidenced in Australia's 2020 Defence Strategic Update, which states that Australia is worried about the potential danger, especially in the military threat that China will pose due to expanding its influence in the Indo-Pacific. Australia is making efforts to respond to threats by balancing.

This study uses a qualitative method with library research techniques, namely data collection through literature studies sourced from several books, journals, articles, state documents, and websites. This study uses the perspective of Neorealism and the theory of Balance of Threat. This theory explains that the state responds to threats by balancing.

The results of this paper are in accordance with the Balance of Threat theory which indicates that Australia responded to China's threat in the South Pacific by carrying out a Pacific Step-up, a military alliance with the United States and Britain and conducting a quadrilateral security dialogue with the United States, Britain and India.

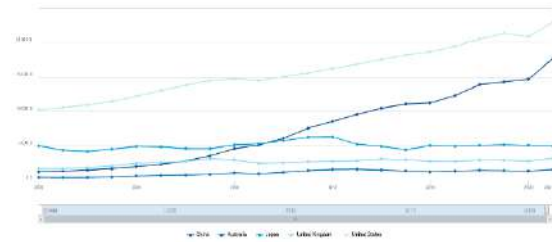
Keywords: *Chinese Influence, Australian Security, Strategic Defence, Balance of Threat.*

PENDAHULUAN

Tatanan dunia baru yang terbentuk sejak Perang Dingin menekankan pada pentingnya kekuatan ekonomi dalam keberlangsungan sebuah negara. Negara dengan kekuatan ekonomi yang besar dapat mempengaruhi sistem internasional. Perubahan ini beriringan dengan fenomena globalisasi yang menyebabkan dunia menjadi lebih cepat akan perubahan serta meningkatnya berbagai hubungan antar negara.

Tiongkok dikenal sebagai negara *rising power* di dunia internasional. *Rising power* merupakan negara dengan pengaruh yang meningkat secara signifikan dalam urusan global. Salah satu indikator dari *rising power* ialah dengan meningkatkan kekuatan negara melalui pertumbuhan kekuatan ekonomi.¹ Tiongkok merupakan salah satu negara yang muncul sebagai kekuatan ekonomi dunia yang berkembang dengan cepat yang juga dikatakan dapat menyaingi negara *great power* seperti Amerika Serikat sejak berakhirnya Perang Dingin. Selama beberapa dekade terakhir, Tiongkok telah mengalami ledakan ekonomi yang tak tertandingi. Hal ini diakibatkan dengan adanya *open door policy* yang menyebabkan reformasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan yang dilembagakan oleh Deng Xiaoping. Kebijakan ini dimulai pada tahun 1979 yang mengakibatkan perekonomian Tiongkok melonjak.

Grafik 1. GDP Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, Inggris, dan Australia Tahun 2000-2021



Sumber: World Development Indicators

Peningkatan GDP (*Gross Domestic Product*) Tiongkok secara signifikan dari tahun 2010 dan telah meroket menjadi terbesar kedua di dunia yang mengalahkan Jepang pada tahun 2010.² Grafik 1 menunjukkan bahwa Tiongkok merupakan ekonomi terbesar kedua di dunia yang menghasilkan jarak yang sangat besar dengan negara-negara lainnya.³ Pada tahun 2021, GDP Amerika Serikat tetap berada di peringkat pertama dengan nominal 22.939,58 miliar USD dan Tiongkok berada di peringkat kedua perekonomian dunia dengan nominal 16.862,98 miliar USD diikuti dengan Jepang, Jerman dan Inggris. Sedangkan Australia berada di peringkat ke-13 dengan nominal 1.610,56 miliar USD.⁴

Pertumbuhan GDP Tiongkok di tahun 2013 hingga 2018 memiliki rata-rata 7,1%.⁵ Hal ini diakibatkan dengan adanya produksi industri dan ekspor manufaktur yang membantu dan memberikan keuntungan serta peningkatan dalam GDP Tiongkok. Dengan munculnya Tiongkok sebagai negara *rising power* mendorong Tiongkok untuk terus melakukan perluasan

¹ Andrew F. Hart and Bruce D. Jones, "How Do Rising Powers Rise?", *Survival* vol. 52, no. 6 (2010), hlm. 65.

² Huma Amin and Arslan Rafique, "The Maritime Rise of China in Indo-Pacific And Indo-US Counter Balancing Approach," *Journal Of Political Science And International Relations* vol. 4, no. 1 (2021), hlm. 20.

³ The World Bank, "World Development Indicators," diakses pada 4 Oktober 2022,

<https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>.

⁴ "Projected GDP Ranking," *Statistic Times*, 26 October 2021, diakses pada 14 Oktober 2022, <https://statisticstimes.com/economy/projected-world-gdp-ranking.php>.

⁵ "China-Real GDP Growth", *Imf*, Diakses pada 20 Oktober 2022, <https://www.imf.org/en/Countries/CHN>.

pengaruhnya terkhususnya di Pasifik Selatan.

Pasifik Selatan merupakan kawasan di selatan Samudera Pasifik yang terdiri dari berbagai negara kepulauan dengan wilayah teritorial yang kecil. Dengan kondisi geografis yang strategis dan sumber daya alam yang melimpah membuat negara-negara tersebut sangat rentan terhadap intervensi asing. Dalam menjalankan upayanya untuk memperluas pengaruhnya di seluruh dunia, Tiongkok muncul sebagai mitra diplomatik dan ekonomi yang penting bagi negara-negara di Pasifik Selatan. Negara-negara di Pasifik Selatan merupakan negara dengan sumber daya alam yang potensial namun memiliki keterbatasan dalam sumber daya manusia dan teknologi.

Secara geografis, negara-negara Pasifik Selatan berukuran kecil dan saling berjauhan yang menyebabkan jalur ekonomi konvensional di sebagian besar negara-negara ini sangat sulit. Tidak hanya itu, negara-negara di Pasifik Selatan juga rentan terkena bencana alam akibat perubahan iklim. Dengan adanya berbagai keterbatasan ini membuat negara di Pasifik Selatan membutuhkan bantuan dari negara lain untuk berkembang. Oleh sebab itu, bantuan luar negeri merupakan salah satu instrumen penting dalam dinamika perpolitikan di kawasan Pasifik Selatan.

Ketertarikan Tiongkok terhadap wilayah Pasifik Selatan sudah ada sejak lama. Dalam pidato Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok Yang Jiechi pada pertemuan tahunan Forum Kepulauan Pasifik pada Oktober 2000, disebutkan bahwa nilai perdagangan di kawasan Pasifik Selatan bernilai hampir dua kali lipat dari dua tahun sebelumnya, serta jumlah perdagangan yang didanai oleh

Tiongkok dan proyek infrastruktur juga berkembang pesat.⁶ Peningkatan minat dan keterlibatan Tiongkok di kawasan Pasifik Selatan diketahui dari berbagai bantuan yang diberikan oleh Tiongkok kepada negara-negara di Pasifik Selatan. Bantuan luar negeri Tiongkok sebagian besar dibentuk oleh kepentingan komersial, dan sering digunakan untuk mempromosikan investasi dan perdagangan Tiongkok.⁷

Australia merupakan sebuah negara dengan kekuatan regional yang memiliki peran penting di kawasan Pasifik Selatan. Australia merupakan pendonor tradisional tertinggi di Pasifik Selatan yang memberikan bantuan dana sebesar \$864.60M.⁸ Sebagai negara dengan posisi pemimpin regional di Pasifik Selatan, Australia memiliki kebijakan luar negeri untuk menjaga keamanan Pasifik Selatan. Hal ini telah diutarakan sebelumnya dalam *Australia 2013 National Security Strategy* yang menjabarkan kepentingan utama dan abadi Australia yaitu untuk menjamin “keamanan, stabilitas, dan kemakmuran ekonomi” di kawasan Pasifik Selatan.⁹ Sebagai negara yang paling dominan di Pasifik Selatan, Australia memiliki kepentingan yang kuat dalam keamanan regional. Tujuan utama kepentingan Australia di Pasifik Selatan adalah untuk memelihara hubungan baik dengan tetangganya dengan memberikan investasi asing dan dukungan untuk lebih memperluas pengaruh Australia.

Kekayaan sumber daya alam dari berbagai negara di Pasifik Selatan menjadi salah satu kepentingan Australia untuk meletakkan pengaruh mereka di negara yang memiliki kekayaan yang cukup besar. Salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam yang menarik perhatian Australia ialah PNG. Terdapat beberapa

⁶ Terence Wesley Smith, "China's Rise in Oceania: Issues And Perspectives", *Pacific Affairs* vol. 86, no. 2 (2013): hlm. 361.

⁷ Shahr Hameiri, "China's 'Charm Offensive' in The Pacific And Australia's Regional Order", *The Pacific Review* 28, no. 5 (2015), hlm. 10.

⁸ "Pacific Aid Map", *Lowy Institute*, diakses pada 24 Oktober 2022, <https://pacificaidmap.lowyinstitute.org/>.

⁹ Australian Government, "Australia's National Security Strategy 2013," 23 January 2013, <https://www.files.ethz.ch/isn/167267/Australia%20A%20Strategy%20for%20National%20Securit.pdf>

perusahaan Australia yang memiliki lisensi penambangan mineral di PNG, seperti *Newcrest Mining* yang memproduksi emas dan perak di tambang Lihir; *Highlands Pacific* yang memproduksi nikel dan kobalt di Ramu NiCo; st. *Barbara dan Niuminco Group Limited* di Simberi dan Edie Creek.¹⁰ Tidak hanya itu, Migas juga menjadi salah satu alasan investasi Australia di PNG. Proyek pipa *Liquefied Natural Gas* (LNG) sebagai pasokan gas cair ke Jepang, Tiongkok dan Korea Selatan yang melibatkan pemerintah Australia sebagai harapan akan meningkatkan perekonomian PNG.¹¹

Kepentingan Tiongkok terhadap kawasan Pasifik merupakan kepentingan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan akan sumber daya alam untuk menggerakkan ekonomi domestiknya serta kepentingan diplomatik dan keamanan dalam membatasi posisi Taiwan dalam panggung global.¹² Tiongkok dikenal sebagai negara yang melakukan perluasan pengaruhnya dengan cara melakukan kerjasama dalam *Belt Road Initiative* (BRI). Program baru Tiongkok untuk konektivitas ekonomi antar kawasan yaitu BRI akan mengembangkan rute perdagangan dan rantai produksi baru yang menghubungkan ekonomi dunia berkembang dengan pasar Tiongkok. Melalui investasi di infrastruktur lokal dan konektivitas di sepanjang koridor perdagangan baru, BRI menawarkan untuk mengintegrasikan ekonomi berkembang lebih jauh ke dalam rantai pasokan global. Memperoleh akses dan pengaruh di Pasifik Selatan dianggap sebagai kepentingan

keamanan dan pertahanan Tiongkok untuk mendukung pembangunan ekonominya di kawasan tersebut. Dalam *China's Ocean Development Report* (2012) disebutkan bahwa Pasifik Selatan merupakan target baru untuk ekspansi maritim Tiongkok.¹³

Pendekatan Tiongkok dilakukan dengan bantuan ekonomi berupa pinjaman dan kerjasama bilateral, bantuan militer dan kerjasama keamanan seperti bantuan peralatan, pelatihan personel, dan latihan bersama kepada negara-negara Pasifik Selatan.

Kepentingan Tiongkok di Pasifik Selatan lainnya ialah untuk mendapatkan pengakuan diplomatik. Persaingan antara Tiongkok dan Taiwan telah lama terjadi dalam memperebutkan pengakuan diplomatik di Pasifik Selatan. Perselisihan Tiongkok dengan Taiwan didasarkan pada kebijakan *One China Policy*, dimana Taiwan sebagai provinsi bagian Tiongkok tidak boleh melakukan hubungan antar negara dengan Amerika Serikat. Kebijakan *One China Policy* mengharuskan negara yang ingin bekerja sama hanya melalui satu pemerintahan saja apabila tetap ingin melakukan kerja sama dengan Tiongkok.¹⁴ Terdapat 10 negara Pasifik Selatan yang mengakui hubungan diplomatik dengan Tiongkok yaitu Papua New Guinea (PNG), Fiji, Kepulauan Solomon, Kiribati Samoa, Vanuatu, Tonga, Niue, Federasi Mikronesia, dan Kepulauan Cook.¹⁵ Sedangkan, terdapat empat negara yang memiliki dan mengakui hubungan diplomatik dengan Taiwan yaitu Palau, Tuvalu, Nauru, dan Kepulauan Marshall.¹⁶

¹⁰ Ibid, hlm. 63

¹¹ Ibid, hlm. 64.

¹² Henryk Szadziwski, "A Search for Coherence: The Belt and Road Initiative in the Pacific Island," di dalam *The China Alternative: Changing Regional Order in the Pacific Islands*, editor Graeme Smith and Terence Wesley-Smith (ANU Press, 2021), hlm. 288-289.

¹³ Vinsensio M.A Dugis, "Memahami Peningkatan Kehadiran China di Pasifik Selatan: Perspektif Realisme Strategik," *Global & Strategis*, vol. 9 no. 1, (2015), hlm. 13.

¹⁴ Inneke Firsana Dewi dan Karina Utami Dewi, "Strategi Pemerintahan Xi Jinping terhadap Taiwan dalam Mengamankan Kedaulatan Tiongkok," *Jurnal Hubungan Internasional*, vol. 7 no. 2 (Maret, 2019), hlm. 162.

¹⁵ Christoph Nedopil, "Countries of The Belt And Road Initiative (BRI) – Green Finance & Development Center", *greenfdc*, 2022, <https://greenfdc.org/countries-of-the-belt-and-road-initiative-bri/>.

¹⁶ "Countries that Recognize Taiwan," *World Population Review*, diakses pada 5 November 2022,

Australia merupakan negara yang paling merasakan dampak dari peningkatan pengaruh Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi yang dominan di Pasifik Selatan. Hal ini menyebabkan terhambatnya kepentingan nasional Australia di Pasifik Selatan sehingga Tiongkok dianggap sebagai rival bagi kepentingan nasional Australia. Australia juga menyebutkan bahwa ia khawatir terhadap potensi ancaman yang dapat dihadirkan Tiongkok di Indo-Pasifik dalam *2020 Defence Strategic Update* sehingga dapat disimpulkan bahwa kehadiran Tiongkok di Pasifik Selatan juga merupakan ancaman bagi Australia.

Kehadiran Tiongkok di Pasifik Selatan telah menciptakan kegelisahan bagi Australia. Pada perkembangan yang terjadi pada saat ini, pengaruh Tiongkok semakin menguat sehingga dianggap menyaingi maupun mengancam hegemoni Australia di Pasifik Selatan.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan menganalisis bagaimana Australia merespon ancaman Tiongkok di kawasan Pasifik Selatan yang merupakan kekhawatiran dan kecemasan Australia terhadap dominasi serta hegemoni yang telah diciptakan oleh Australia di kawasan Pasifik Selatan.

KERANGKA TEORI

Perspektif Neorealisme

Perspektif neorealisme didasarkan pada sebuah sistem internasional yang anarki dimana dasar dari perspektif ini tidak terdapat kekuasaan dan otoritas yang lebih tinggi dari negara. Dengan tidak adanya otoritas maupun kekuatan secara global yang dapat menyediakan keamanan dan stabilitas maka setiap negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanannya dengan cara melindungi dirinya sendiri atau *self-help*.¹⁷

Power atau kekuatan merupakan hal yang penting bagi sebuah negara baik untuk mempertahankan wilayah, meningkatkan ekonomi dan militer serta menjaga warga negaranya. Akibat dari tidak terdapatnya otoritas untuk mengatur sistem internasional, maka negara sering kali merasa terancam dengan potensi serangan dari negara lain. Menurut Waltz, negara yang mencari kekuatan ataupun menambah kekuatannya diakibatkan oleh sistem internasional anarki dimana tidak terdapat otoritas global yang dapat memberikan proteksi.¹⁸ Sehingga demi menjaga keamanan dari potensi ancaman yang ada, maka negara harus mengupayakan untuk meningkatkan kekuatannya agar dapat menghindari dampak perkembangan kekuatan negara lain.

Tiongkok sebagai *rising power* memiliki kapabilitas yang dapat membentuk dan memberikan pengaruh pada sistem internasional yang anarkis. Dengan kondisi sistem internasional yang anarkis menjadikan negara-negara seperti Australia harus mengakumulasi kekuatan untuk dapat bertahan dalam sistem internasional yang anarki.

Teori Balance of Threat

Balance of threat merupakan teori yang diargumentasikan oleh Walt yang memfokuskan pada perilaku negara terhadap persepsi ancaman.¹⁹ Teori ini membantu menjelaskan aliansi antar negara yang dilakukan karena negara merasa terancam. Teori *balance of threat* merupakan kritik dari teori *balance of power* yang meninggalkan teka-teki dalam menjelaskan perilaku negara dengan *secondary power*. Menurut Waltz, teori *balance of threat* berfokus pada

<https://worldpopulationreview.com/country-rankings/countries-that-recognize-taiwan>.

¹⁷ Kenneth N Waltz, *Theory of International Politics* (Addison-Wesley Publishing Company, 1979), hlm. 111.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 114.

¹⁹ Stephen M Walt, "Alliance Formation and The Balance of World Power," *International Security* vol. 9, no. 4 (1985), hlm. 4-5.

perimbangan untuk mengatasi ancaman yang ada.²⁰

Fenomena *rising power* seringkali diawali dengan kebangkitan ekonomi dan dilanjutkan dengan naluri alamiah *rising power* yang memiliki keinginan untuk melakukan pengembangan *power*. Fenomena ini dapat menjadi ancaman bagi negara-negara di sekitarnya. Hal ini disebabkan oleh ekspansi pengaruh dari *rising power* yang dapat menyebabkan konflik dari rivalitas serta gesekan kepentingan antar negara. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah respon untuk dapat menghadapi implikasi dari *rising power*.

Walt memberikan persepsi bahwa *power* suatu negara terhadap negara lain akan menjadi kerugian atau dapat menjadi sebuah keuntungan bagi keamanan negara tersebut tergantung dengan sumber ancaman tersebut. Menurut Walt, untuk menentukan ancaman, terdapat empat faktor yang harus diperhatikan yaitu *aggregate power*, *geographic proximity*, *offensive power*, dan *aggressive intentions*.²¹

METODE PENELITIAN

Penelitian digunakan penulis untuk melakukan analisa dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif yang menjelaskan, menggambarkan, mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data yang dilanjutkan oleh pemaparan serta analisa dengan fenomena-fenomena yang terjadi sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang akurat serta objektif sebagai jawaban dari rumusan masalah.

Penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka atau *library research*. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen publik seperti kebijakan-kebijakan negara Tiongkok dan Australia,

buku, jurnal, surat kabar, media massa internet, artikel *website* resmi dan arsip online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

China's Rise

Kebangkitan ekonomi Tiongkok yang dikenal sebagai *China's rise* atau *China rising* merupakan sebuah hasil dari faktor-faktor yang Tiongkok lakukan sehingga menjadi kekuatan ekonomi sejak reorientasi produksi dalam kapitalisme global pada masa pemerintahan Deng Xiaoping tahun 1980-an.²² Dengan pemikiran strategis yang buat oleh Deng Xiaoping, Tiongkok muncul sebagai negara yang menjalankan kebijakan luar negerinya dengan lebih terbuka. Kebijakan luar negeri Tiongkok yang diberlakukan pada masa reformasi ekonomi dikenal sebagai *Open Door Policy* meningkatkan peran Tiongkok dalam perdagangan internasional.

Strategi Tiongkok sebagai *rising power* berada di puncak saat masa kepemimpinan Xi Jinping, selaku presiden Tiongkok yang menyampaikan pandangannya tentang masa depan Tiongkok. Hu Jintao memiliki kesamaan strategi dengan Deng Xiaoping yaitu fokus dalam pembangunan dalam negeri dan pembangunan penuh kedamaian sedangkan perubahan terjadi pada saat kepemimpinan Xi Jinping berfokus pada impian Tiongkok di masa lalu yaitu menjadi negara terkuat dalam bidang ekonomi, politik dan militer. Sehingga dapat diketahui kebangkitan ekonomi Tiongkok menjadi landasan Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya.

Aspirasi Nasional Tiongkok "Chinese Dream" dan "Great Rejuvenation"

Munculnya Xi Jinping sejak tahun 2012 telah menyebabkan transformasi dalam kebijakan dalam dan luar negeri

²⁰ Stephen M Walt, *The Origin of Alliances* (Ithaca: Cornell University Press, 1986), hlm. 5.

²¹ *Ibid*, hlm. 22.

²² Ashley Smith dari ISR mewawancarai aktivis dan cekiawan Au Loong Yu tentang sifat kemunculan Tiongkok sebagai kekuatan

kekaisaran baru serta artinya bagi sistem dunia. Ashley Smith, "China's Rise as a World Power," *International Socialist Review*, diakses pada 14 November 2022, <https://isreview.org/issue/112/chinas-rise-world-power/index.html>.

Tiongkok. Hal ini disebabkan oleh kampanye “*Chinese dream*” yang dipromosikan oleh Xi Jinping sejak menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok pada Kongres ke-18 Partai Komunis Tiongkok yang diadakan pada November 2012. “*Chinese dream*” memainkan peran penting dalam mengatur pemikiran dan tindakan dalam politik Tiongkok karena sering kali mencerminkan prioritas baru atau yang berubah pada kepemimpinan Tiongkok.

Menelusuri sejarah Tiongkok modern dari kekalahan yang memalukan bagi Tiongkok oleh Inggris Raya pada pertengahan abad kesembilan belas, Xi Jinping menyoroti “*Chinese dream*” sebagai tema pemersatu bagi Tiongkok untuk mencapai kebangkitan nasional yang besar. “*Chinese dream*” dipresentasikan sebagai visi untuk pembangunan Tiongkok selama beberapa dekade mendatang dengan konsep intinya “*rejuvenation*” atau peremajaan nasional (Fùxīng, 复兴).²³ Dengan menggunakan kata “*rejuvenation*”, ditekankan bahwa pekerjaan Partai adalah mengembalikan Tiongkok ke posisi dan kejayaannya semula.

Slogan “*Chinese Dream*” bertujuan untuk membangun masyarakat Tiongkok yang makmur dengan pertumbuhan berkelanjutan pada tahun 2021 serta membangun negara yang harmonis, modern dan maju secara kebudayaan pada tahun 2049.²⁴ Slogan “*Chinese Dream*” digunakan oleh para pemimpin Tiongkok yang berkaitan dengan perkembangan peran internasional dan strategi kebijakan luar negeri Tiongkok.

Pada saat kepemimpinan Xi Jinping, kondisi internasional sedang tidak menentu dimana Amerika Serikat sedang dibawah kepemimpinan Obama yang tidak

memfokuskan kekuatan militer dalam agenda politik luar negerinya. Sehingga Tiongkok melihat peluang ini menjadi momen strategis untuk mengeluarkan strategi terbarunya yakni, *Belt and Road Initiative* atau disingkat sebagai BRI. BRI disebut oleh Xi Jinping sebagai upaya raksasa untuk membangun kembali bangsa Tiongkok.²⁵ BRI merupakan upaya membangun jaringan ekonomi dari Asia hingga Timur Tengah dan Eropa. Tiongkok menggunakan jalur sutera yang membentang dari Tiongkok hingga Timur Tengah sebagai landasan dasar strategi BRI. Tidak hanya negara-negara yang dilewati jalur sutera, namun negara yang berbeda kawasan juga dituntut agar ikut serta.

Hanya dalam waktu kurang dari tiga dekade, Tiongkok telah mengubah dirinya dari negara berkembang yang miskin menjadi kekuatan ekonomi global. Beijing sekarang telah mengarahkan pandangannya untuk menjadi negara adidaya dunia. Demi mencapai tujuannya, Tiongkok melakukan berbagai bentuk kerja sama internasional, menjalankan berbagai kebijakan luar negeri dan menjalin konektivitas dengan banyak negara, termasuk negara-negara di Kepulauan Pasifik. Kawasan Pasifik Selatan merupakan bagian dari diplomasi strategi Tiongkok secara global. Dimana kehadiran Tiongkok di Kepulauan Pasifik membawa potensi signifikan bagi negara di Kepulauan Pasifik.

Ancaman Tiongkok di Pasifik Selatan

Meskipun banyak yang menganggap Kawasan Pasifik Selatan terbelakang dan terpencil, hubungan Tiongkok dengan kawasan tersebut telah berkembang pesat sejak akhir 1990-an. Selama tiga dekade terakhir, Tiongkok terus membangun

²³ Zheng Wang, “The Chinese Dream: Concept and Context,” *Journal of Chinese Political Science* vol. 19, no.1 (2013), hlm. 6.

²⁴ Cary Huang, “Just What is Xi Jinping’s ‘Chinese dream’ and ‘Chinese renaissance’?,” *South China Morning Post*, 6 Feb 2013, <https://www.scmp.com/news/china/article/1143954>

[/just-what-xi-jinpings-chinese-dream-and-chinese-renaissance](https://just-what-xi-jinpings-chinese-dream-and-chinese-renaissance).

²⁵ Angela Stanzel, “Grand Design: Does China Have a Grand Strategy?” ECFR.EU, 18 Oktober 2017, https://ecfr.eu/publication/grands_designs_does_china_have_a_grand_strategy/.

pengaruhnya di Pasifik Selatan. Ekspansi Tiongkok di Pasifik Selatan mencerminkan kekuatan ekonomi dan geopolitik Tiongkok sebagai *rising power*. Kehadiran Tiongkok di Pasifik Selatan merupakan cara untuk memperluas pasar dan mendapatkan akses ke bahan baku dan sumber daya untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi sebagai cara yang diperlukan untuk memperkuat legitimasi diplomatik Tiongkok sebagai kekuatan global.

Dari 14 negara yang membentuk *Pacific Island Forum* (PIF)²⁶ terdapat sepuluh negara yang mengakui Tiongkok, negara-negara tersebut telah menjalin hubungan diplomatik, ekonomi, politik, dan budaya mereka dengan Tiongkok yang berlangsung secara intensif. Tiongkok muncul sebagai pemain yang semakin penting di kawasan ini melalui keterlibatan politik dan diplomatik yang aktif, pemberian bantuan yang signifikan dengan tujuan untuk meningkatkan perdagangan, membangun infrastruktur, memperlengkapi pemerintah dan aset militer, dan pengembangan sumber daya alam, serta perluasan hubungan perdagangan dan ekonomi. Selain itu, Tiongkok juga terlibat dalam kerja sama keamanan dengan negara-negara Pasifik Selatan baik dalam bentuk pelatihan, kunjungan diplomatik maupun berupa bantuan militer.

People's Liberation Army (PLA) atau angkatan militer Tiongkok telah melakukan kunjungan ke negara-negara Pasifik Selatan untuk membahas masalah keamanan di Pasifik Selatan yang pada masa pemerintahan Xi Jinping mulai menarik perhatian global. Kapal Rumah Sakit *Peace Ark* Angkatan Laut PLA mengunjungi Fiji, PNG, Tonga dan Vanuatu pada tahun 2014 dan 2018 serta melakukan kegiatan seperti tur medis dan donasi obat yang disambut hangat oleh masyarakat setempat. Tidak

hanya itu, sebagai bukti komitmen Xi Jinping untuk memberikan peningkatan kapasitas dukungan ke negara-negara berkembang, Kementerian Keamanan Publik Tiongkok telah mengadakan 23 sesi pelatihan peningkatan kapasitas untuk lembaga penegak hukum negara-negara Pasifik Selatan sejak 2017, yang dihadiri oleh total 490 petugas penegak hukum.²⁷

Dengan adanya kunjungan rutin dari PLA menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kehadiran Tiongkok dalam bidang militer yang kian meningkat terutama pada masa kepemimpinan Xi Jinping. Hal ini merupakan kegiatan yang memberikan pengaruh yang substansial atas kehadiran diplomatik dan kunjungan pejabat tinggi militer Tiongkok di Pasifik Selatan. Kapal Angkatan Laut yang datang ke empat negara Pasifik Selatan juga membuka jalan masuknya militer Tiongkok ke Pasifik Selatan. Terjalannya hubungan antara negara-negara Pasifik Selatan dengan Tiongkok dengan melakukan kerja sama keamanan, menerima bantuan, dan pelatihan membuat negara-negara Pasifik Selatan melakukan perilaku yang diinginkan Tiongkok yang sejalan dengan kepentingan Tiongkok di Pasifik Selatan.

Tiongkok sebagai negara *rising power* sedang memperluas pengaruhnya di berbagai bagian dunia termasuk di Pasifik Selatan yang merupakan wilayah hegemoni regional Australia. Australia melihat kehadiran Tiongkok dengan kekuatannya yang besar menimbulkan rasa takut maupun terancam dengan keberadaan Tiongkok. Hal ini didukung dengan pendekatan Tiongkok yang signifikan beserta dengan peningkatan bantuan maupun kerja sama keamanan dengan negara-negara di Pasifik Selatan dalam dua dekade terakhir. Berikut dijelaskan

²⁶ "The Pacific Island Forum," Pacific Island Forum, diakses tanggal 20 November 2022, <https://www.forumsec.org/who-we-are-pacific-islands-forum/>.

²⁷ Ministry of Foreign Affairs of the People's of Republic of China. "Fact Sheet: Cooperation

Between China and Pacific Island Countries." 24 May 2022. https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/202205/t20220524_10691917.html.

beberapa bentuk ancaman Tiongkok terhadap Australia di Pasifik Selatan.

Aggregate and Offensive Power Tiongkok

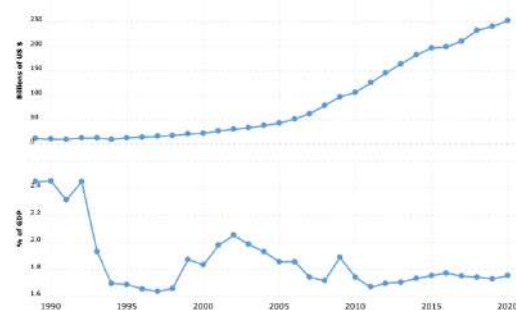
Aggregate power merupakan akumulasi kekuatan ekonomi dan militer sebuah negara. Ukuran *aggregate power* dapat dilihat dari jumlah populasi dan kapabilitas kekuatan negara tersebut.²⁸ Tiongkok dan Australia merupakan negara dengan pertumbuhan perekonomian yang tinggi dimana pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada tahun 2021 mencapai 8% yang sebelumnya menurun menjadi 2% pada tahun 2020, sedangkan pertumbuhan ekonomi Australia hanya mencapai 1,3% pada tahun 2021.²⁹

Tiongkok sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar tentu saja mengeluarkan pengeluaran yang besar untuk kekuatan militernya. Tiongkok diketahui sebagai negara pembelanja militer terbesar kedua di dunia. Berdasarkan dokumen resmi pertahanan Tiongkok, *China White Paper on National Defense 2008*, disebutkan bahwa prinsip dasar peningkatan anggaran pertahanan dan militer angkatan bersenjata Tiongkok didasarkan pada kesinambungan yang sama antara kebutuhan pertahanan dan pertumbuhan pembangunan ekonomi.³⁰

Dalam waktu kurang lebih 30 tahun sejak Tiongkok melaksanakan kebijakan terbuka pada tahun 1979, Tiongkok telah berupaya untuk membangun kekuatan militer internal yang kuat yang selaras dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Tiongkok. Untuk itu, peningkatan anggaran pertahanan dan militer angkatan bersenjata Tiongkok selalu dijaga pada

tingkat yang wajar dan disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Tiongkok.

Grafik 2. Pengeluaran Militer/Anggaran Pertahanan Tiongkok 1989-2022³¹



Sumber: World Bank

Dari Grafik 2 terdapat peningkatan belanja militer yang signifikan dengan mempertahankan alokasi dari GDP untuk pertahanan. Tiongkok sebagai pembelanja terbesar militer kedua di dunia, mengalokasikan sekitar \$293 miliar untuk militernya pada tahun 2021 yang meningkat sebesar 4,7 persen dari tahun 2020 dan 72 persen dari tahun 2012.³²

Grafik 3. Pengeluaran Militer Australia (% dari GDP) 2011-2020



Sumber: Data World Bank

²⁸ Stephen M Walt, *The Origin of Alliances* (Ithaca: Cornell University Press, 1986), hlm. 22.

²⁹ "GDP per Capita Growth (Annual %) China-Australia 2017-2021," *The World Bank Data*, diakses pada November 2022, <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD.ZG?end=2021&locations=CN-AU&start=2017>.

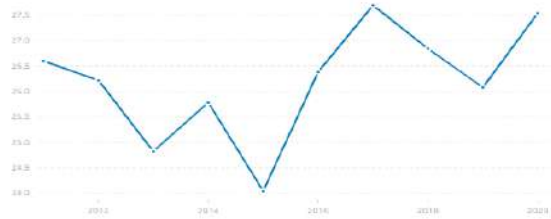
³⁰ Information Office of the State Council of The People's Republic of China, "China's National Defense in 2008," January 2009,

https://programs.fas.org/ssp/nukes/2008DefenseWhitePaper_Jan2009.pdf.

³¹ "China Military Spending/ Defense Budget 1989-2022," *Macrotrends*, diakses pada 18 November 2022, <https://www.macrotrends.net/countries/CHN/china/military-spending-defense-budget>.

³² Diego Lopes da Silva *et al.*, "Trends in World Military Expenditure, 2021," *SIPRI Fact Sheet*, April 2022, https://www.sipri.org/sites/default/files/2022-04/fs_2204_milex_2021_0.pdf.

**Grafik 4. Pengeluaran
Militer/Anggaran Pertahanan Australia
2011-2020**



Sumber: Data World Bank

Sedangkan untuk alokasi dana pertahanan Australia seperti yang terdapat dalam Grafik 3 dari tahun 2011 hingga 2020 memiliki rata-rata sekitar 2.1% dari GDP Australia. Alokasi dana pertahanan Australia mengalami penurunan pada tahun 2015 yang mencapai 24.05 juta USD lalu pada tahun 2020 mencapai sekitar 27.54 juta USD.³³ Walaupun terlihat pada Grafik 4 terdapat penurunan, Australia tetap melakukan pembenahan diri untuk tetap meningkatkan kekuatan militernya. Tentunya, pengeluaran militer Australia sangat berbeda dibandingkan alokasi dana pertahanan Tiongkok yang sangat besar dan terus mengalami peningkatan yang stabil.

**Tabel 1. Jumlah Personel Militer
Tiongkok dan Australia Tahun 2022**

Pasukan Militer	Tiongkok (Jiwa)	Australia (Jiwa)
Total Populasi	1.397.897.720	25.809.973
Sumber Daya Manusia	754.864.769	10.840.189
Siap Melayani Negara	619.268.690	8.878.631
Mencapai Usia Militer	19.570.568	283.910
Total Personil Militer	3.134.000	79.000
Personil Aktif	2.000.000	59.000
Personil Cadangan	510.000	20.000
Paramiliter	624.000	0

Sumber: Global Fire Power

Tidak hanya dari peningkatan anggaran militer, jumlah penduduk juga menjadi kekuatan penting sebuah negara. Jumlah populasi dapat tolak ukur ketersediaan sumber daya manusia dalam bidang militer. Sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia, Tiongkok memiliki jumlah pasukan yang dapat

memenangi perang. Tabel 1 menunjukkan bahwa personel militer Tiongkok berada di tingkat pertama dibandingkan oleh Australia yang berada di peringkat ke-55.

**Tabel 2. Jumlah Kekuatan Persenjaan
Militer Tiongkok dan Australia Tahun
2022**

Perbandingan Persenjaan Militer		Tiongkok	Australia
Persenjaan Darat	Tank Tempur	5.250	59
	Kendaraan Tempur Lapis Baja	35.000	1.765
	Self-Propelled Artillery	4.120	0
	Towed Artillery	1.734	54
	Proyektor Roket	3.160	0
Persenjaan Udara	Fighters	1.200	72
	Attack	371	37
	Transport	286	38
	Pelatih	399	113
	Special Mission	114	31
	Armada Kapal Tanker	3	6
	Helikopter	912	133
	Helikopter Tempur	281	22
Persenjaan Laut	Kapal Induk	2	0
	Kapal Pengawal	1	2
	Kapal Penghancur	41	3
	Fregat	49	8
	Korvet	70	0
	Kapal Selam	79	6
	Kapal patroli	152	12
	Mine Warfare	36	4

Sumber: Global Fire Power

Tiongkok juga memiliki kekuatan militer yang besar berdasarkan persenjataan militer yang dimilikinya. Kekuatan ofensif dan militer yang dimiliki oleh Tiongkok jauh lebih besar dibandingkan Australia. Tiongkok merupakan negara dengan kekuatan armada angkatan laut pertama sedangkan Australia berada di peringkat ke-59. Tiongkok juga berada di peringkat ke-3 untuk kekuatan armada angkatan udara sedangkan Australia berada di peringkat ke-30. Untuk kekuatan armada angkatan darat Tiongkok berada di peringkat ke-4 sedangkan Australia berada di peringkat ke-88.

Berdasarkan perbandingan antara Tiongkok dan Australia dalam hal jumlah penduduk, sumber daya manusia, kekuatan ekonomi dari pertumbuhan GDP dan alokasi dana pertahanan, beserta kekuatan ofensif atau militer terlihat bahwa kekuatan agregat dan kekuatan ofensif Tiongkok yang besar sejalan dengan potensi ancaman

³³ "Military Expenditure (Current USD)- Australia 2011-2020," *The World Bank*, diakses pada November 2022,

<https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPN.D.CD?end=2020&locations=AU&start=2011&view=chart>.

yang ditimbulkan kepada Australia untuk bersaing dalam merebut pengaruh di wilayah Pasifik Selatan. Sehingga tentu saja timbul rasa khawatir Australia terhadap kekuatan peningkatan pengaruh Tiongkok secara keseluruhan di Pasifik Selatan.

Geography Proximity Tiongkok terhadap Australia

Geography proximity merupakan salah satu bentuk ancaman yang diukur dari kedekatan geografis.³⁴ Hal ini dikarenakan kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan menurun dengan jarak, keadaan yang dekat akan menimbulkan ancaman yang lebih besar daripada yang jauh. Negara akan memberikan respon langsung jika ancaman berada di dekatnya dibanding dengan ancaman yang jauh dari wilayahnya. Dalam hal ini, memang Tiongkok berada jauh dengan Australia namun Tiongkok tetap dapat memberikan ancaman dengan melakukan pendekatan-pendekatan kepada negara-negara di Pasifik Selatan.

Gambar 1. Peta Selat Taiwan dan Selat Miyako



Sumber: *Welt-Atlas and Kyodo Graphic*

Armada angkatan laut PLA yang telah dimodernisasi sering berlayar melalui Selat Taiwan dan Selat Miyako yang berada di sepanjang rantai pulau pertama. Oleh karena itu, pada Januari 2017, surat kabar resmi China, *People's Daily*, dengan yakin memprediksi, 'Hanya masalah waktu

sebelum kapal induk Tiongkok melintasi rantai pulau kedua dan mencapai Pasifik Timur.³⁵ Tidak hanya itu, Tiongkok juga telah berhasil memperkuat pengaruhnya dengan mengirimkan kapal angkatan laut Tiongkok ke negara-negara Pasifik Selatan seperti dengan PNG, Tonga, Vanuatu dan Fiji yang secara geografis berdekatan dengan Australia yang mengakibatkan peningkatan ancaman bagi Australia di Pasifik Selatan.

Aggressive Intention Tiongkok di Pasifik Selatan

Kawasan Pasifik Selatan merupakan kawasan yang penting bagi Tiongkok untuk menyebarkan pengaruhnya, untuk mendapatkan sekutu baru, dan untuk menguji kemampuan dan kekuatannya yang berkembang untuk memimpin kesetiaan di kawasan tersebut. Persepsi ancaman Australia didasari oleh kekhawatiran akan dibangunnya pangkalan militer Tiongkok di Pasifik Selatan sehingga membuat Australia lebih memperhatikan kebangkitan Tiongkok dan mengambil tanggung jawab utama untuk mengamankan kawasan Pasifik Selatan serta melindungi kepentingan nasional Australia.

Kekhawatiran Australia dan pandangannya terhadap Tiongkok sebagai ancaman di Pasifik Selatan juga didukung dengan banyaknya komentar strategis di Australia yang memberitakan bahwa dermaga yang didanai Beijing di Vanuatu akan menjadi tempat belah kapal perang Tiongkok yang meningkatkan kekhawatiran pelabuhan dapat dikonversi menjadi instalasi angkatan laut Tiongkok.³⁶ Perdana Menteri Malcolm Turnbull merilis peringatan dan menyebutkan kekhawatirannya untuk Vanuatu dan

³⁴ Stephen M Walt, *The Origin of Alliances* (Ithaca: Cornell University Press, 1986), hlm. 23.

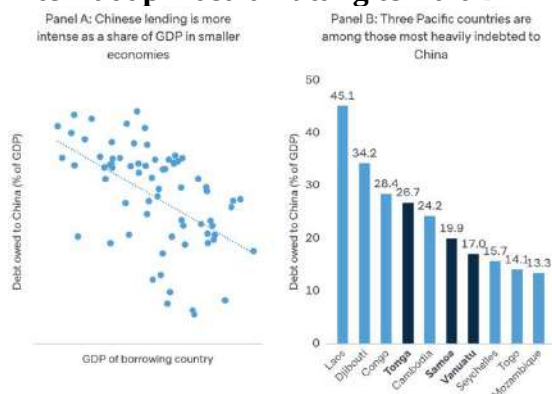
³⁵ Denghua Zhang, "China's Diplomacy in The Pacific Interest: Means and Implication," *Security Challenges*, vol. 13 no. 2 (2017), hlm. 40.

³⁶ David Wroe, "The Great Wharf from China: Raising Eyebrows Across the Pacific," 11 April 2018, <https://www.smh.com.au/politics/federal/the-great-wharf-from-china-raising-eyebrows-across-the-pacific-20180411-p4z8yu.html>.

Tiongkok akan pembentukan pangkalan militer di kawasan Pasifik Selatan.³⁷

Australia juga memiliki perhatian terhadap salah satu kerja sama Tiongkok dengan negara Pasifik Selatan yang dikenal sebagai BRI. Kebijakan BRI Xi Jinping dikenal sebagai *debt trap diplomacy* yaitu pemberian pinjaman dari negara pemberi pinjaman kepada negara peminjam yang akan menjerumuskan negara peminjam ke dalam kondisi terjebak dalam utangnya sendiri dimana sering kali menjebak berbagai negara berpenghasilan rendah agar dapat melakukan penawaran.³⁸ Hal ini telah berlangsung di Sri Lanka, dimana Tiongkok sekarang mengendalikan pelabuhan strategis utama, dan di Djibouti, dimana Tiongkok mengendalikan pelabuhan dan instalasi militer.

Grafik 5. Negara-negara Pasifik Selatan termasuk negara yang paling rentan terhadap masalah utang terkait BRI



Sumber: Lowy Institute

Hal ini menjadi kekhawatiran bagi negara-negara donor tradisional di Pasifik Selatan karena dapat dilihat dari Grafik 5

pinjaman yang diberikan oleh Tiongkok lebih intens kepada negara-negara dengan perekonomian yang kecil. Tiongkok saat ini berupaya mengulangi pola yang sama di Pasifik Selatan dimana Tonga, Samoa dan Vanuatu menjadi tiga negara Pasifik di antara sepuluh negara yang paling banyak berhutang kepada Tiongkok.

Tonga, Samoa dan Vanuatu merupakan negara berukuran sedang dengan populasi hanya 100.000–300.000 orang.³⁹ Geografi ekonomi yang sulit mendorong kebutuhan pembiayaan pembangunan yang sangat besar, menciptakan tekanan yang dapat diprediksi menjadi akumulasi utang karena pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan dan permintaan penduduk lokal. Negara-negara Pasifik Selatan sedikit banyak adalah wilayah yang paling bergantung pada bantuan di dunia.

Tonga merupakan salah satu negara yang terjebak dalam jebakan Tiongkok. Pada tahun 2006, kerusuhan anti-pemerintah, pro-demokrasi hampir menghancurkan ibu kota, Nuku'alofa. Setelah kerusuhan mereda, Tiongkok turun tangan untuk membantu dengan memberikan pinjaman awal sekitar \$65 juta dan pada tahun 2018, biayanya hampir dua kali lipat biaya awal.⁴⁰ Akibat tidak bisa membayar hutang Tonga tidak memiliki pilihan lain akhirnya bergabung dengan *Belt and Road Initiative* dengan imbalan penundaan utang selama lima tahun.⁴¹

Hal sama terjadi di Kiribati, dimana Kiribati dilaporkan mencari pinjaman dari Taiwan untuk membeli pesawat komersial

³⁷ "Chinese military base in Pacific would be of 'great concern', Turnbull tells Vanuatu," *ABC*, 10 April 2018, <https://www.abc.net.au/news/2018-04-10/china-military-base-in-vanuatu-report-of-concern-turnbull-says/9635742>.

³⁸ Haderiansyah, et al., "Policy of China's Debt-Trap Diplomacy: The Influence of Media in Forming Community Political Opinions," *DIA: Journal Administrasi Publik*, vol. 18 no. 2 (Desember: 2020), hlm. 170-171.

³⁹ Asian Development Bank, "Key Indicators for Asia and the Pacific 2018," September 2018,

<https://www.adb.org/publications/key-indicators-asia-and-pacific-2018>.

⁴⁰ Therese Shaheen, "China's Predatory Debt-Trap Diplomacy Threatens the South Pacific," *National Review*, 8 July 2020, diakses pada November 2022, <https://www.nationalreview.com/2020/07/china-debt-trap-diplomacy-threatens-south-pacific/>.

⁴¹ "Tonga gets five years' grace on Chinese loan as Pacific nation joins Belt and Road initiative," *ABC*, 18 November 2018, <https://www.abc.net.au/news/2018-11-19/china-defers-tongas-loan-payments-as-nation-signs-up-to-bri/10509140>.

untuk memfasilitasi perjalanan antar-atol dan pengembangan Kiritimati, atol karang terbesar di dunia, sebagai tujuan wisata. Pada September 2019, setelah Taiwan menolak, Kiribati beralih ke Tiongkok dan mengakhiri pengakuan diplomatiknya terhadap Taiwan.⁴² Dan pada bulan Januari 2020, Taneti Maamau, Perdana Menteri Kiribati menandatangani *Belt and Road Initiative*, dalam sebuah perjanjian yang akan memberi Tiongkok akses ke pelabuhan laut dalam utama di lepas pantai Kiritimati.⁴³ Pada tahun yang sama Kepulauan Solomon juga mengakhiri pengakuan diplomatiknya dan menandatangani kerja sama *Belt Road Initiative*⁴⁴.

Lalu terdapat Vanuatu yang memiliki ikatan ekonomi dan budaya yang kuat dengan Australia, Selandia Baru, dan Uni Eropa, namun masa depannya semakin bergantung pada pinjaman dari Beijing. Vanuatu mencari lebih banyak dukungan keuangan Tiongkok untuk pembangunan infrastruktur melalui *Belt and Road Initiative*. China Eximbank telah memberikan pinjaman lunak kepada pemerintah sebesar RMB 541,9 juta untuk Proyek Rehabilitasi dan Perluasan Dermaga Utama Port Luganville.⁴⁵ Dimana membuat pemerintah Australia menyuarakan keprihatinannya tentang kemungkinan pangkalan angkatan laut Tiongkok di masa depan.

Dengan sumber daya Tiongkok yang sangat kuat diikuti dengan kekuatan militer beserta peralatan militer yang dimilikinya diiringi bersama peningkatan kehadirannya yang terdapat di Pasifik Selatan

menyebabkan Australia semakin waspada akan Tiongkok. Kurangnya transparansi antara Tiongkok dan negara yang melakukan kerja sama bersama Tiongkok beserta kekhawatiran akan Tiongkok yang membangun pangkalan militer di Pasifik Selatan dapat mempengaruhi keamanan dan kepentingan nasional Australia karena negara-negara Pasifik Selatan terletak di wilayah regional Australia. Hal ini membuat Australia waspada dan mengembangkan persepsi ancaman terhadap Tiongkok di kawasan Pasifik Selatan. Oleh karena itu, stabilitas dan keamanan kawasan Pasifik Selatan penting bagi keamanan dan kemakmuran Australia. Australia merasa tidak aman jika tetangga terdekatnya menjadi sumber ancaman bagi Australia. Ancaman keamanan mencakup meningkatnya pengaruh kekuatan militer asing di lingkungan terdekat Australia yang mampu menantang kepentingan nasional Australia. Oleh sebab itu, Australia memutuskan untuk meningkatkan kekuatan pertahanan diri dan memperkuat aliansinya dengan negara-negara besar lainnya.

Respon Australia Terhadap Ancaman Tiongkok di Pasifik Selatan

Pada April 2018, dermaga yang didanai Beijing di Vanuatu menimbulkan kekhawatiran Australia akan menjadi instalasi angkatan laut Tiongkok sehingga Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull memperingatkan Tiongkok agar tidak mendirikan pangkalan militer di Pasifik Selatan karena akan membahayakan perdamaian regional.⁴⁶ Kekhawatiran Australia terhadap ancaman Tiongkok juga

⁴² Therese Shaheen, *Op.Cit*.

⁴³ "China, Kiribati sign MOU on Belt and Road Initiative After Restoring Diplomatic Ties," *CGTN*, 06 January 2020, <https://news.cgtn.com/news/2020-01-06/Xi-Jinping-meets-Kiribati-s-president-in-Beijing--N2gIPad7xe/index.html>.

⁴⁴ "Solomon Islands Recognizes China, Joins Belt And Road Initiative," *Silk Road Briefing*, 11 October 2019, <https://www.silkroadbriefing.com/news/2019/10/11/solomon-islands-recognizes-china-joins-belt-road-initiative/>.

⁴⁵ "China Eximbank provides RMB 541.9 million government concessional loan for Rehabilitation and Extension of Port Luganville Main Wharf Project," *China Aid Data*, Diakses pada November 2022, <https://china.aiddata.org/projects/37748/>.

⁴⁶ David Wroe, "The Great Wharf from China: Raising Eyebrows Across the Pacific," 11 April 2018, <https://www.smh.com.au/politics/federal/the-great-wharf-from-china-raising-eyebrows-across-the-pacific-20180411-p4z8yu.html>.

dijelaskan pada 2020 *Strategic Defence* bahwa Australia khawatir dengan potensi tindakan Tiongkok untuk mendapatkan pengaruh yang lebih besar di Indo-Pasifik, seperti pendirian pangkalan militer, yang dapat merusak stabilitas di Indo-Pasifik dan kawasan terdekat Australia yaitu Pasifik Selatan.⁴⁷

Pada Agustus 2018, Pemerintah Turnbull merupakan negara pertama yang telah melarang perusahaan telekomunikasi Tiongkok yakni Huawei dan ZTE untuk menyediakan teknologi 5G ke Australia sebagai tanggapan atas saran keamanan, setelah menetapkan aturan baru dalam pernyataan panduan keamanan kepada vendor dan perusahaan telekomunikasi yang membangun infrastruktur seluler generasi berikutnya.⁴⁸ Larangan ini muncul akibat kekhawatiran pemerintah Australia akan perusahaan seperti Huawei dan ZTE dipaksa oleh pemerintah Tiongkok untuk membahayakan keamanan infrastruktur 5G di Australia.

Pada bulan April 2022, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengonfirmasi bahwa Beijing telah menandatangani perjanjian keamanan minimal lima tahun dengan Kepulauan Solomon. Wakil Perdana Menteri Australia yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Richard Marles merespon terkait kerja sama keamanan yang diajukan Tiongkok ke negara-negara Pasifik Selatan sebagai kecemasan terbesar Australia dan juga menyebutkan bahwa kehadiran Tiongkok di Pasifik Selatan merupakan tantangan terbesar Australia.⁴⁹

Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dan delegasi beranggotakan 20 orang tiba di Kepulauan Solomon pada Mei 2022 untuk tur delapan negara Pasifik Selatan. Tur ini ada ditengah meningkatnya kekhawatiran tentang ambisi militer Tiongkok di kawasan Pasifik Selatan sehingga membuat Australia merespon dengan mengirimkan Menteri Luar Negerinya sendiri, Penny Wong, ke Fiji untuk menopang dukungan di Pasifik Selatan.⁵⁰

Menghadapi kekhawatiran dan kecemasan terhadap kehadiran Tiongkok yang semakin besar di Pasifik Selatan, Australia membentuk kebijakan yang menekankan kerja sama dan hubungan dengan negara-negara Pasifik Selatan serta membentuk aliansi bersama *great power* sebagai tanggapan dan bukti kekhawatiran dan kecemasan Australia akan kehadiran Tiongkok yang semakin meningkat di Pasifik Selatan. Hal ini dapat dibuktikan dari upaya Australia dalam mencari keseimbangan untuk mengatasi ancaman yang ada yang tercermin dalam perilaku kebijakan luar negeri Australia.

Strategi *Balancing* Australia Dalam Menghadapi Ancaman Tiongkok di Kawasan Pasifik Selatan

Dalam merespons ancaman Tiongkok di wilayah Pasifik Selatan, Australia melakukan strategi *balancing* dengan memperkuat hubungan dan kerja sama bersama negara-negara Pasifik Selatan serta melakukan aliansi dengan negara-negara sekutu. Sebagai tanggapan atas kehadiran Tiongkok yang semakin

⁴⁷ Australian Government Department of Defence, "2020 Defence Strategic Update," 1 July 2020, hlm. 11, <https://www.defence.gov.au/about/strategic-planning/2020-defence-strategic-update>.

⁴⁸ Tim Biggs dan Jennifer Duke, "China's Huawei, ZTE banned from 5G network," *The Sydney Morning Herald*, Diakses pada 12 Januari 2023, <https://www.smh.com.au/technology/government-implies-5g-china-ban-in-new-security-advice-20180823-p4zz77.html>.

⁴⁹ Tyrone Clarke, "Deputy Prime Minister Richard Marles says China is Australia's 'biggest security

anxiety' as Beijing renews drive in Pacific," *Skynews*, diakses pada 6 Januari 2023, <https://www.skynews.com.au/australia-news/politics/deputy-prime-minister-richard-marles-says-china-is-australias-biggest-security-anxiety-as-beijing-renews-drive-in-pacific/news-story/6e4c1482a1d049947d7dc5fa0fb5fd7e>.

⁵⁰ "China's foreign minister starts Pacific tour in the Solomon Islands," *nbcnews.com*, diakses pada 12 Januari 2023, <https://www.nbcnews.com/news/world/china-wang-yi-pacific-tour-solomon-islands-rcna30603>.

meningkat di Pasifik Selatan Australia berusaha mencari keseimbangan untuk mengatasi ancaman yang ada yang tercermin dalam perilaku kebijakan luar negeri Australia.

1. Kebijakan “*Pacific Step-up*” Australia dalam Bidang Keamanan

Peningkatan keterlibatan Pasifik Selatan dalam kebijakan Australia dimulai pada September 2016 ketika Perdana Menteri Malcolm Turnbull mengumumkan di KTT PIF sebagai ‘*step change*’ di kawasan Pasifik Selatan.⁵¹ Kebijakan disebut sebagai *Pacific Step-up* yang dijabarkan pertama kali di *2017 Foreign Policy White Paper*. Disebutkan bahwa Australia harus meningkatkan upaya untuk mendukung Pasifik Selatan akibat serangkaian ancaman keamanan nasional yang membutuhkan pertahanan yang kuat di dalam negeri dan tindakan tegas di luar negeri untuk menjaga kawasan regional Australia untuk tetap aman, terlindungi, dan bebas.⁵²

Pacific step-up meliputi peningkatan kerja sama keamanan Australia bersama dengan negara-negara Pasifik, termasuk melalui keterlibatan *Australian Defense Force* (ADF) di Pasifik Selatan dengan melakukan latihan angkatan pertahanan permanen bagi negara-negara Pasifik Selatan serta meningkatkan penyebaran dan latihan angkatan laut di beberapa titik di Pasifik Selatan.⁵³ *Pacific step-up* juga melakukan pengiriman kapal patroli yang

lebih besar ke wilayah Pasifik Selatan dan keterlibatan dalam pengawasan udara melalui *Pacific Maritime Security Programme*, dan peningkatan keamanan telekomunikasi melalui pembangunan *Coral Sea Cable System* untuk mengalahkan pengaruh Tiongkok.⁵⁴

a. *Pacific Maritime Security Program*

Program *Pacific Maritime Security Program* diterapkan pada tahun 2017 merupakan komitmen Australia dalam menjaga keamanan maritim kawasan Pasifik Selatan senilai \$2 miliar untuk wilayah Pasifik Selatan termasuk Timor Leste selama 30 tahun ke depan, yang terdiri dari tiga komponen: penggantian Kapal Patroli Pasifik, pengawasan udara regional terpadu, dan upaya untuk memperkuat koordinasi regional.⁵⁵

Pacific Maritime Security Program membantu memperkenalkan dan memberikan kapal patroli ke negara-negara Pasifik Selatan. Dalam *Defense Annual Report 2018-2019* terdapat tiga Kapal Patroli Kelas Penjaga pertama telah diserahkan ke PNG, Tuvalu, dan Tonga.⁵⁶ Selanjutnya dalam *Defense Annual Report 2019-2020* dikirimkannya *Guardian class Patrol Boats* ke Samoa, Kepulauan Solomon,

⁵¹ Merriden Varrall, “Australia’s Response to China in the Pacific: From Alert to Alarmed,” di dalam *The China Alternative: Changing Regional Order in the Pacific Islands*, editor Graeme Smith and Terence Wesley-Smith, (Canberra: ANU Press, 2021), hlm. 124.

⁵² Australian Government, “2017 Foreign Policy White Paper,” 23 November 2017, <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/2017-foreign-policy-white-paper.pdf>.

⁵³ Jane Norman, “Scott Morrison Reveals Multi-Billion Dollar Infrastructure Development Bank for Pacific,” ABC News, 8 November 2018, <https://www.abc.net.au/news/2018-11-08/scott-morrison-announces-pacific-infrastructure-bank/10475452>.

⁵⁴ Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, “Stepping Up Australia’s Engagement with Our Pacific Family,” September 2019,

<https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/stepping-up-australias-engagement-with-our-pacific-family.pdf>.

⁵⁵ Australian Government Department of Defence, “Annual Report 2017-2018,” 2 October 2018, <https://www.defence.gov.au/about/information-disclosures/annual-reports>, hlm. 15.

⁵⁶ Australian Government Department of Defence, “Annual Report 2018-2019,” 25 September 2019, <https://www.defence.gov.au/about/information-disclosures/annual-reports>, hlm. 25.

dan Fiji.⁵⁷ Per Juni 2021, 11 dari 21 *Guardian class Patrol Boats* telah dikirim ke negara-negara Kepulauan Pasifik dan Timor Leste.⁵⁸

Pada tahun 2017-2018 terdapat pengawasan udara kontrak sipil di seluruh kawasan Pasifik Selatan. Pengawasan udara memiliki kemampuan yang mendukung patroli maritim yang digerakkan oleh intelijen sehingga dengan peningkatan kapasitas ini kawasan Pasifik akan lebih mudah menemukan dan menghentikan aktivitas ilegal di dalam Zona Ekonomi Eksklusif masing-masing negara dan laut lepas yang berdekatan. Australia telah melakukan strategi *balancing* dengan memberikan kapal patrol serta pengawasan udara di kawasan Pasifik Selatan.

b. Coral Sea Cable System di PNG dan Solomon Islands

Coral Sea Cable System merupakan proyek yang menyediakan infrastruktur komunikasi yang lebih cepat, murah dan andal serta dapat memberikan manfaat ekonomi dan pembangunan yang signifikan bagi Kepulauan Solomon dan PNG.⁵⁹ *Coral Sea Cable System* merupakan kabel telekomunikasi bawah laut serat optik sepanjang 4.700 kilometer, yang menghubungkan PNG dan Kepulauan Solomon ke Hub Internet Pantai Timur utama di Sydney, Australia. Proyek ini

juga mencakup Jaringan Domestik Kepulauan Solomon, kabel bawah laut sepanjang 730 km yang menghubungkan Honiara ke tiga pusat provinsi yaitu Auki di Provinsi Malaita, Noro di Provinsi Barat dan Taro di Provinsi Choiseul. Alasan diajukannya *Coral Sea Cable System* di PNG dan kepulauan Solomon karena kabel bawah laut PNG yang tersambung ke Sydney telah mendekati akhir masa pakainya dan kepulauan Solomon yang tidak memiliki sambungan kabel telekomunikasi bawah laut, sehingga bergantung pada komunikasi satelit yang mahal dan tidak dapat diandalkan.

Perusahaan komunikasi Australia, Vocus, bertanggung jawab atas pembangunan kabel bawah laut utama yang dikenal sebagai *Coral Sea Cable System*. Australia memperkenalkan proyek ini pada tahun 2017 dengan hibah sebesar \$137 juta kepada Kepulauan Solomon dan PNG dan kesepakatan ini disetujui pada tahun 2018.⁶⁰ *Memorandum of understanding* (MOU) tentang pendanaan pembangunan dan pemasangan *Coral Sea Cable System* telah ditandatangani di Brisbane pada 11 Juli 2018 antara Australia, Papua Nugini dan Kepulauan Solomon.⁶¹ Australia juga pada masa Pemerintah Turnbull memblokir Huawei dan ZTE pada Agustus 2018 dalam peluncuran jaringan 5G karena masalah keamanan.⁶²

⁵⁷ Australian Government Department of Defence, "Annual Report 2019-2020," 21 September 2020, <https://www.defence.gov.au/about/information-disclosures/annual-reports>, hlm. 34.

⁵⁸ Australian Government Department of Defence, "Annual Report 2020-2021," 21 September 2021, <https://www.defence.gov.au/about/information-disclosures/annual-reports>, hlm. 44.

⁵⁹ Australia Department of Foreign Affairs and Trade, "The Coral Sea Cable System: Supporting the Future Digital Economies of Papua New Guinea and Solomon Islands," September 2018, <https://www.dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/supporting-the-future-digital-economies-of-papua-new-guinea-and-solomon-islands>.

⁶⁰ Colin Packham, "Ousting Huawei, Australia finishes laying undersea internet cable for Pacific allies," *Reuters*, 28 August 2019, <https://www.reuters.com/article/us-australia-pacific-cable/ousting-huawei-australia-finishes-laying-undersea-internet-cable-for-pacific-allies-idUSKCN1VI08H>.

⁶¹ Mavis Nishimura P Odokolo, "SI, Aus and PNG sign Coral Sea cable system MOU," *The Island Sun*, 13 July 2018, <https://theislandsun.com.sb/si-aus-and-png-sign-coral-sea-cable-system-mou/>.

⁶² Amy Remeikis, "China accuses Australia of discriminating against Huawei," *The Guardian*, diakses pada 10 Januari 2023, <https://www.theguardian.com/australia->

Coral Sea Cable System merupakan realisasi dari Strategi Keterlibatan Siber Internasional Australia yang menetapkan pendekatan Australia dalam membantu menjembatani kesenjangan digital di seluruh Indo-Pasifik. Proyek ini hadir sebagai salah satu bentuk respon *balancing* Australia terhadap ancaman Tiongkok serta untuk tidak melibatkan *Huawei*, raksasa telekomunikasi Tiongkok yang dianggap sebagai ancaman keamanan siber di Pasifik Selatan.

c. Keterlibatan *Australian Defence Force* (ADF) di Pasifik Selatan

Tanggapan Australia terhadap peningkatan pengaruh Tiongkok adalah dengan memperkuat hubungan pertahanan bilateralnya dengan negara-negara Melanesia di Pasifik Selatan yang terdiri dari PNG, Fiji, dan Vanuatu melalui peningkatan keterlibatan termasuk pelatihan militer, kerja sama keamanan dan latihan secara rutin.

Dalam *Defense Strategic Update 2020* terdapat *South-West Pacific – Australian Defence Engagement 2020*, yang menjelaskan empat negara yang paling banyak terlibat dengan kebijakan pertahanan Australia seperti terdapat personel pertahanan negara, proyek infrastruktur besar yang didanai oleh pertahanan Australia, pelatihan bersama ADF, pelatihan spesialis, menerima pengawasan udara yang disponsori pertahanan Australia sebagai anggota *Forum Fisheries Agency*, memiliki *Pacific Patrol Boats* dan akan mendapatkan *Guardian Class Patrol Boats* (GPB).

Pemerintah Australia mengerahkan ADF untuk melakukan operasi dan memberikan dukungan di Australia dan

lingkungan terdekatnya serta mempromosikan stabilitas, integritas, dan kohesi secara global. Terdapat dua operasi yang dilakukan oleh ADF sebagai bentuk kerja sama pertahanan Australia dengan negara-negara di Kawasan Pasifik Selatan, yaitu *Indo-Pacific Endeavour* dan *Enhanced Regional Engagement*.

Indo-Pacific Endeavour (IPE) dimulai pada tahun 2017 sebagai kegiatan tahunan yang dikoordinasikan oleh Angkatan Bersenjata Australia untuk memenuhi janji *Australian Defence White Paper* guna memperkuat keterlibatan dan kemitraan Australia dengan pasukan keamanan kawasan.⁶³ Dilaksanakan di kawasan Pasifik Selatan pada Juni 2018, dengan mengunjungi sejumlah negara Kepulauan Pasifik, personel ADF bekerja bersama pasukan keamanan mitra untuk mendukung pengembangan kapasitas keamanan laut regional, dan kemampuan bantuan kemanusiaan serta bantuan bencana.⁶⁴ IPE dilakukan di empat negara Pasifik Selatan yaitu Fiji, Vanuatu, Tonga dan Samoa dari bulan Juni hingga September 2018, Kelompok Tugas Gabungan terdiri dari 1.200 personel dan empat aset maritim Australia yaitu: *HMA Ships Adelaide, Melbourne, Toowoomba*, dan *Success*.⁶⁵

Enhanced Regional Engagement merupakan salah satu kegiatan keterlibatan ADF dengan banyak pengerahan aset dan personel darat, udara, dan maritim di seluruh kawasan. Tugas ADF termasuk patroli di perbatasan maritim barat Kepulauan Solomon, pembangunan jaringan radio darurat di Vanuatu, dan pembangunan

[news/2020/feb/17/china-accuses-australia-of-discriminating-against-huawei](https://www.defence.gov.au/news/2020/feb/17/china-accuses-australia-of-discriminating-against-huawei).

⁶³ Australian Government Department of Defence, "Indo Pacific Endeavour," *Defence Government*, diakses pada 31 Oktober 2022, <https://www.defence.gov.au/operations/indo-pacific-endeavour>.

⁶⁴ Australian Government Department of Defence, "Annual Report 2017-2018," 2 October 2018, hlm. 20, <https://www.defence.gov.au/about/information-disclosures/annual-reports>.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 71.

fasilitas pelatihan militer Blackrock di Fiji.⁶⁶

Keterlibatan pertahanan Australia di Pasifik Selatan menjadi salah satu respon *balancing* yang dilakukan oleh Australia dalam menghadapi peningkatan pengaruh Tiongkok di Pasifik Selatan. Hal ini dibuktikan dari Australia menyamai keterlibatan pertahanan Tiongkok di Pasifik Selatan.

2. Quad (*Quadrilateral Security Dialogue*)

Australia dan Amerika Serikat tergabung kembali kedalam sebuah pakta keamanan yang disebut sebagai *Quadrilateral Security Dialogue* atau sering disebut dengan “Quad” bersama Jepang dan India pada tahun 2017. Quad merupakan jaringan diplomatik empat negara yang berkomitmen untuk mendukung Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka yang inklusif dan tangguh. Ini melengkapi kerja sama bilateral, regional, dan multilateral lainnya, termasuk dengan negara-negara anggota ASEAN dan mitra Pasifik.

China rising telah memicu keinginan baru untuk memajukan prakarsa substantif dalam kerja sama pertahanan, keamanan maritim, dan pembangunan infrastruktur. Kerja sama keamanan antara India, Australia, Jepang, dan Amerika Serikat memiliki potensi terbesar untuk memperbaiki ketimpangan regional akibat pengaruh Tiongkok sebagai aliansi yang muncul untuk mengimbangi Tiongkok.⁶⁷ Quad berfungsi untuk memperkuat hubungan

militer dalam menghadapi Tiongkok di Indo-Pasifik termasuk di Pasifik Selatan walaupun disebutkan secara implisit. Peningkatan pengaruh Tiongkok secara agresif telah menyebabkan kolaborasi yang lebih kuat di antara negara-negara uad dalam upaya untuk membatasi kecenderungan revisionis Beijing dan kebijakan *Belt and Road Initiative* (BRI) yang sering disebut sebagai “*debt trap*”. Pinjaman BRI menimbulkan risiko terutama bagi ekonomi Pasifik yang sedang berkembang dan rapuh.

Quad merilis pernyataan bersama setelah KTT Tokyo Mei 2022 dimana Quad berjanji untuk lebih memperkuat kerja sama mereka dengan Negara-negara Kepulauan Pasifik untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, meningkatkan infrastruktur kesehatan, memperkuat ketahanan lingkungan, melindungi keamanan kawasan Pasifik Selatan.⁶⁸ Para pemimpin Quad juga mengungkapkan rencana pengawasan maritim Indo-Pasifik yang menjanjikan bantuan infrastruktur dan investasi sebesar \$50 miliar USD selama lima tahun ke depan dalam upaya melawan pengaruh Tiongkok di Pasifik Selatan.⁶⁹

3. AUKUS (*Australia, United Kingdom, United States*)

Pada 16 September 2021, para pemimpin Australia, Inggris, dan Amerika Serikat mengumumkan pembentukan kemitraan keamanan trilateral yang ditingkatkan disebut sebagai “AUKUS” (akronim dari Australia, United Kingdom, dan United States).⁷⁰ Menurut para pengamat

⁶⁶ Australian Government Department of Defence, “Annual Report 2020-2021,” 21 September 2021, hlm. 25, <https://www.defence.gov.au/about/information-disclosures/annual-reports>.

⁶⁷ Jeff M. Smith, *Asia's Quest for Balance China's Rise and Balancing in the Indo-Pacific* (Landham: Rowman & Littlefield, 2018): hlm. 170.

⁶⁸ Ministry of External Affairs Government of India, “Quad Joint Leaders’ Statement,” 24 May 2022, <https://www.mea.gov.in/bilateral->

<documents.htm?dtl/35357/Quad+Joint+Leaders+Statement>.

⁶⁹ Zaheena Rasheed, “At Tokyo Summit, Quad Offers ‘Tangible Benefits’ to Counter China,” Aljazeera, 24 May 2022, <https://www.aljazeera.com/news/2022/5/24/quad-leaders-meet-in-japan-to-discuss-china-russia-tensions>.

⁷⁰ Australian Government Department of Defence, “Annual Report 2020-2021,” 21 September 2021, hlm. 190,

internasional, AUKUS dibentuk sebagai strategi Amerika Serikat dan sekutunya dalam melawan hegemoni Tiongkok yang intensinya disebutkan secara implisit pada saat pengumuman bersama oleh Perdana Menteri Scott Morrison dan Boris Johnson dan Presiden Joe Biden.⁷¹

Secara khusus, AUKUS akan secara signifikan memperdalam kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan namun tetap mempromosikan serta berbagi informasi dan teknologi yang lebih dalam tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan basis industri. Sebagai inisiatif pertama di bawah AUKUS, negara-negara tersebut telah berkomitmen pada ambisi bersama untuk mendukung Australia dalam memperoleh kapal selam bertenaga nuklir untuk Angkatan Laut Australia. AUKUS akan memberi Australia kapal selam bertenaga nuklir yang dipersenjatai secara konvensional dan sedini mungkin sembari menegakkan standar non-proliferasi tertinggi.⁷² AUKUS juga akan mengembangkan dan menyediakan kemampuan militer canggih bersama untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.⁷³

AUKUS hadir sebagai sebuah cara untuk melakukan *counter* pada peningkatan pengaruh Tiongkok yang dianggap sebagai ancaman keamananyang meningkat. Pakta kerja sama pertahanan ini akan merombak kemampuan angkatan laut Australia seiring dengan pertumbuhan Tiongkok di Indo-Pasifik termasuk di Pasifik Selatan.

KESIMPULAN

Tiongkok muncul kembali di dunia internasional sebagai negara *rising power* yang memiliki aspirasi nasional “Chinese

Dream” dan “*Great Rejuvenation*” sebagai dasar untuk memperluas pengaruhnya di seluruh dunia termasuk di Pasifik Selatan. Pendekatan yang dilakukan Tiongkok di Pasifik Selatan menimbulkan rasa khawatir dan ketidakamanan bagi Australia.

Australia melakukan respon dalam bidang keamanan terhadap ancaman Tiongkok di kawasan Pasifik Selatan dengan melakukan peningkatan keterlibatannya di negara-negara Pasifik Selatan melalui kebijakan *Pacific Step-up* dengan melakukan *Pacific Maritime Security Program* sebagai bentuk *balancing* untuk memperketat keamanan maritim dengan memberikan negara-negara Pasifik Selatan kapal patrol. *Pacific Step-up* juga melakukan *Coral Sea Cable System* untuk menghalangi penggunaan *Huawei* di kawasan Pasifik Selatan dengan alasan keamanan nasional. Selanjutnya, terdapat pengadaan personel ADF dengan program-program keamanan ADF di Pasifik Selatan sebagai bentuk *internal balancing* yang dilakukan Australia untuk tetap mempertahankan pengaruhnya di Pasifik Selatan. Australia juga melakukan *external balancing* bersama negara great power yaitu Amerika Serikat dalam melakukan *counter* terhadap peningkatan pengaruh Tiongkok di Pasifik Selatan. Upaya *balancing* juga dilakukan Australia dengan beraliansi bersama negara-negara lain seperti Inggris, Jepang dan India untuk meningkatkan keamanan militernya di kawasan Pasifik Selatan dengan membentuk dialog keamanan Bernama “Quad”. Australia juga bergabung dalam kemitraan keamanan trilateral dengan Amerika Serikat dan Inggris untuk memperkuat angkatan lautnya sebagai salah satu upaya *balancing*. Selain itu,

<https://www.defence.gov.au/about/information-disclosures/annual-reports>.

⁷¹ “The Aukus agreement, what repercussions for the European Union?” *Foundation Robert Schuman*, 27 September 2021, diakses November 2022, <https://www.robert-schuman.eu/en/european-issues/0608-the-aukus-agreement-what-repercussions-for-the-european-union>.

⁷² Australian Government, “Fact Sheet: Implementation of Australia – United Kingdom – United States Partnership (AUKUS),” 6 April 2022, <https://www.defence.gov.au/about/taskforces/nuclear-powered-submarine-task-force/fact-sheets>.

⁷³ *Ibid*.

Australia juga melakukan *balancing* sebagai bentuk respon peningkatan pengaruh Tiongkok di Pasifik Selatan sebagai negara dominan di Pasifik Selatan sehingga dapat menjadi strategi yang dapat mempersempit ruang gerak Tiongkok di Pasifik Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- "China Eximbank provides RMB 541.9 million government concessional loan for Rehabilitation and Extension of Port Luganville Main Wharf Project." *China Aid Data*. Diakses pada November 2022. <https://china.aiddata.org/projects/37748/>.
- "China-Real GDP Growth." *Imf*. Diakses pada 20 Oktober 2022. <https://www.imf.org/en/Countries/CHN>.
- "Pacific Aid Map." *Lowy Institute*. Diakses pada 24 Oktober 2022. <https://pacificaidmap.lowyinstitute.org/>.
- "Solomon Islands Recognizes China, Joins Belt And Road Initiative." *Silk Road Briefing*. 11 October 2019. <https://www.silkroadbriefing.com/news/2019/10/11/solomon-islands-recognizes-china-joins-belt-road-initiative/>.
- "China Military Spending/ Defence Budget 1989-2022." *Macrotrends*. Diakses pada 18 November 2022. <https://www.macrotrends.net/countries/CHN/china/military-spending-defense-budget>.
- "China, Kiribati sign MOU on Belt and Road Initiative After Restoring Diplomatic Ties." *CGTN*. 06 January 2020. <https://news.cgtn.com/news/2020-01-06/Xi-Jinping-meets-Kiribati-s-president-in-Beijing--N2gIPad7xe/index.html>.
- "China's foreign minister starts Pacific tour in the Solomon Islands." *nbcnews.com*. Diakses pada 12 Januari 2023. <https://www.nbcnews.com/news/world/china-wang-yi-pacific-tour-solomon-islands-rcna30603>.
- "Chinese military base in Pacific would be of 'great concern', Turnbull tells Vanuatu." *Abc*. 10 April 2018. <https://www.abc.net.au/news/2018-04-10/china-military-base-in-vanuatu-report-of-concern-turnbull-says/9635742>.
- "Countries that Recognize Taiwan." *World Population Review*. Diakses pada 5 November 2022. <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/countries-that-recognize-taiwan>.
- "GDP per Capita Growth (Annual %) China-Australia 2017-2021." *The World Bank Data*. Diakses pada November 2022, <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD.ZG?end=2021&locations=CN-AU&start=2017>.
- "GDP per Capita Growth (Annual %) China-Australia 2017-2021." *The World Bank Data*. Diakses pada November 2022, <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD.ZG?end=2021&locations=CN-AU&start=2017>.
- "Military Expenditure (Current USD)-Australia 2011-2020." *The World Bank*. Diakses pada November 2022. <https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.CD?end=2020&locations=AU&start=2011&view=chart>.
- "Projected GDP Ranking." *Statistic Times*. 26 October 2021. Diakses pada 14 Oktober 2022. <https://statisticstimes.com/economy/projected-world-gdp-ranking.php>.
- "The Aukus agreement, what repercussions for the European Union?" *Fondation Robert Schuman*. 27 September 2021. <https://www.robert->

- schuman.eu/en/european-issues/0608-the-aukus-agreement-what-repercussions-for-the-european-union.
- “The Pacific Island Forum.” Pacific Island Forum. Diakses tanggal 20 November 2022. <https://www.forumsec.org/who-we-arepacific-islands-forum/>.
- “Tonga Gets Five Years' Grace on Chinese Loan as Pacific Nation Joins Belt and Road Initiative.” ABC. 18 November 2018. <https://www.abc.net.au/news/2018-11-19/china-defers-tongas-loan-payments-as-nation-signs-up-to-bri/10509140>.
- Amin, Huma, and Arslan Rafique. "The Maritime Rise of China in Indo-Pacific and Indo-US Counter Balancing Approach." *Journal Of Political Science And International Relations* vol. 4, no. 1 (2021): 18-23.
- Asian Development Bank, "Key Indicators for Asia and the Pacific 2018." September 2018. <https://www.adb.org/publications/key-indicators-asia-and-pacific-2018>.
- Australia Department of Foreign Affairs and Trade. “The Coral Sea Cable System: Supporting the Future Digital Economies of Papua New Guinea and Solomon Islands.” September 2018. <https://www.dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/supporting-the-future-digital-economies-of-papua-new-guinea-and-solomon-islands>.
- Australian Government Department of Defence. “2020 Defence Strategic Update.” 1 July 2020. <https://www.defence.gov.au/about/strategic-planning/2020-defence-strategic-update>.
- Australian Government Department of Defence. “Annual Report 2017-2018.” 2 October 2018. <https://www.defence.gov.au/about/information-disclosures/annual-reports>.
- Australian Government Department of Defence. “Annual Report 2018-2019,” 25 September 2019. <https://www.defence.gov.au/about/information-disclosures/annual-reports>.
- Australian Government Department of Defence. “Annual Report 2019-2020.” 21 September 2020. <https://www.defence.gov.au/about/information-disclosures/annual-reports>.
- Australian Government Department of Defence. “Annual Report 2020-2021,” 21 September 2021. <https://www.defence.gov.au/about/information-disclosures/annual-reports>.
- Australian Government Department of Defence. “Indo Pacific Endeavour.” *Defence Government*. Diakses pada 31 Oktober 2022. <https://www.defence.gov.au/operations/indo-pacific-endeavour>.
- Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade. “Stepping Up Australia’s Engagement with Our Pacific Family,” September 2019. <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/stepping-up-australias-engagement-with-our-pacific-family.pdf>.
- Australian Government. “2017 Foreign Policy White Paper.” 23 November 2017. <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/2017-foreign-policy-white-paper.pdf>.
- Australian Government. “Australia’s National Security Strategy 2013.” 23 January 2013. <https://www.files.ethz.ch/isn/167267/Australia%20A%20Strategy%20for%20National%20Securit.pdf>.
- Biggs, Tim, dan Jennifer Duke. “China’s Huawei, ZTE banned from 5G

- network.” *The Sydney Morning Herald*. Diakses pada 12 Januari 2023.
<https://www.smh.com.au/technology/government-implies-5g-china-ban-in-new-security-advice-20180823-p4zz77.html>.
- Clarke, Tyrone. “Deputy Prime Minister Richard Marles says China is Australia's 'biggest security anxiety' as Beijing renews drive in Pacific.” *Skynews*. Diakses pada 6 Januari 2023.
<https://www.skynews.com.au/australia-news/politics/deputy-prime-minister-richard-marles-says-china-is-australias-biggest-security-anxiety-as-beijing-renews-drive-in-pacific/news-story/6e4c1482a1d049947d7dc5fa0fb5fd7e>.
- Dewi, Inneke Firsana dan Karina Utami Dewi. “Strategi Pemerintahan Xi Jinping terhadap Taiwan dalam Mengamankan Kedaulatan Tiongkok.” *Jurnal Hubungan Internasional* vol. 7 no. 2 (2019): 161-168.
- Dugis, Vinsensio M.A. “Memahami Peningkatan Kehadiran China di Pasifik Selatan: Perspektif Realisme Strategik.” *Global & Strategis* vol. 9 no. 1 (2015): 1-18.
- Haderiansyah. *et al.* “Policy of China’s Debt-Trap Diplomacy: The Influence of Media in Forming Community Political Opinions.” *DIA: Journal Administrasi Publik* vol. 18 no. 2 (2020): 170-178.
- Hameiri, Shahar. “China's ‘Charm Offensive’ in The Pacific and Australia's Regional Order”. *The Pacific Review* vol. 28 no. 5 (2015): 1-24.
- Hart, Andrew F., and Bruce D. Jones. “How Do Rising Powers Rise?”. *Survival* vol. 52 no. 6 (2010): 63-88.
- Huang, Cary. “Just What is Xi Jinping’s ‘Chinese dream’ and ‘Chinese renaissance’?” *South China Morning Post*. 6 Feb 2013.
<https://www.scmp.com/news/china/article/1143954/just-what-xi-jinpings-chinese-dream-and-chinese-renaissance>.
- Information Office of the State Council of The People’s Republic of China. “China’s National Defence in 2008.” January 2009.
https://programs.fas.org/ssp/nukes/2008DefenseWhitePaper_Jan2009.pdf
- Information Office of the State Council of The People’s Republic of China. “China’s National Defence in 2008.” January 2009.
https://programs.fas.org/ssp/nukes/2008DefenseWhitePaper_Jan2009.pdf.
- Ministry of External Affairs Government of India. “Quad Joint Leaders’ Statement.” 24 May 2022.
<https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/35357/Quad+Joint+Leaders+Statement>.
- Ministry of Foreign Affairs of the People’s of Republic of China. “Fact Sheet: Cooperation Between China and Pacific Island Countries.” 24 May 2022.
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/202205/t20220524_10691917.html.
- Nedopil, Christoph. “Countries of The Belt And Road Initiative (BRI) – Green Finance & Development Center”. *Greenfdc.Org*, 2022.
<https://greenfdc.org/countries-of-the-belt-and-road-initiative-bri/>.
- Norman, Jane “Scott Morrison Reveals Multi-Billion Dollar Infrastructure Development Bank for Pacific.” *ABC News*. 8 November 2018.
<https://www.abc.net.au/news/2018-11-08/scott-morrison-announces-pacific-infrastructure-bank/10475452>.
- Odokolo, Mavis Nishimura P “SI, Aus and PNG sign Coral Sea cable system

- MOU," *The Island Sun*, 13 July 2018, <https://theislandsun.com.sb/si-aus-and-png-sign-coral-sea-cable-system-mou/>.
- Packham, Colin. "Ousting Huawei, Australia finishes laying undersea internet cable for Pacific allies." *Reuters*. 28 August 2019. <https://www.reuters.com/article/us-australia-pacific-cable/ousting-huawei-australia-finishes-laying-undersea-internet-cable-for-pacific-allies-idUSKCN1VI08H>
- Rasheed, Zaheena. "At Tokyo Summit, Quad Offers 'Tangible Benefits' to Counter China." *Aljazeera*. 24 May 2022. <https://www.aljazeera.com/news/2022/5/24/quad-leaders-meet-in-japan-to-discuss-china-russia-tensions>.
- Remeikis, Amy. "China accuses Australia of discriminating against Huawei." *The Guardian*. Diakses pada 10 Januari 2023. <https://www.theguardian.com/australia-news/2020/feb/17/china-accuses-australia-of-discriminating-against-huawei>.
- Shaheen, Therese. "China's Predatory Debt-Trap Diplomacy Threatens the South Pacific." *National Review*. 8 July 2020. Diakses pada November 2022. <https://www.nationalreview.com/2020/07/china-debt-trap-diplomacy-threatens-south-pacific/>.
- Silva, Diego Lopes da *et al.* "Trends in World Military Expenditure, 2021." SIPRI Fact Sheet. April 2022. https://www.sipri.org/sites/default/files/2022-04/fs_2204_milex_2021_0.pdf
- Smith, Ashley. "China's Rise as a World Power." *International Socialist Review*, diakses pada 14 November 2022, <https://isreview.org/issue/112/china-s-rise-world-power/index.html>.
- Smith, Jeff M. *Asia's Quest for Balance China's Rise and Balancing in the Indo-Pacific* Landham: Rowman & Littlefield, 2018.
- Smith, Terence Wesley. "China's Rise in Oceania: Issues and Perspective." *Pacific Affairs* vol. 86 no. 2 (2013): 351-372.
- Stanzel, Angela. "Grand Design: Does China Have a Grand Strategy?" *ECFR.EU*. 18 Oktober 2017. https://ecfr.eu/publication/grands_designs_does_china_have_a_grand_strategy/.
- Szadziwski, Henryk. "A Search for Coherence: The Belt and Road Initiative in the Pacific Island," di dalam *The China Alternative, Changing Regional Order in the Pacific Islands*, editor Graeme Smith and Terence Wesley-Smith, 283-218. Canberra: ANU Press, 2021.
- The World Bank. "World Development Indicators." *World Bank*. Diakses pada 4 Oktober 2022. <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>.
- Varrall, Merriden. "Australia's Response to China in the Pacific: From Alert to Alarmed," di dalam *The China Alternative: Changing Regional Order in the Pacific Islands*, editor Graeme Smith and Terence Wesley-Smith, 107-142. Canberra: ANU Press, 2021.
- Walt, Stephen M. "Alliance Formation and The Balance of World Power". *International Security* vol. 9 no. 4 (1985): 3-43.
- Walt, Stephen M. *The Origin of Alliances*. Ithaca: Cornell University Press, 1986.
- Waltz, Kenneth N. *Theory of International Politics*. Addison-Wesley Publishing Company, 1979.
- Wang, Zheng "The Chinese Dream: Concept and Context," *Journal of Chinese Political Science* vol. 19 no.1 (2013): 1-13.

- Wroe, David. "The Great Wharf from China: Raising Eyebrows Across the Pacific." 11 April 2018. <https://www.smh.com.au/politics/federal/the-great-wharf-from-china-raising-eyebrows-across-the-pacific-20180411-p4z8yu.html>.
- Zhang, Denghua. "China's Diplomacy in The Pacific Interest: Means and Implication." *Security Challenges*, vol. 13 no. 2 (2017): 32-53.
-